DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

TUGAS DAN FUNGSI

VISI DAN MISI

TUJUAN DAN NILAI DASAR

RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI PENCAPAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

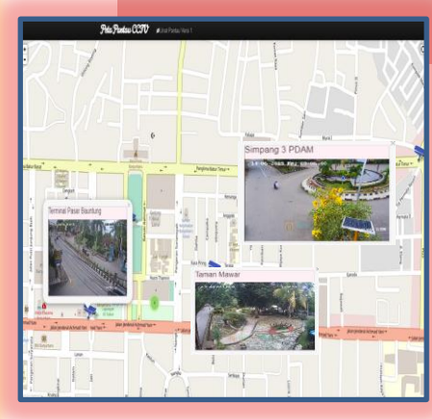

diskominfo
KOTA BANJARBARU

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Banjarbaru periode 2016-2021 merupakan bagian integral dari program pembangunan Kota Banjarbaru yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD perubahan 2016-2021.

Secara garis besar Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adanya perubahan RPJMD 2016-2021, perubahan sasaran yang akan dicapai untuk mendukung misi Kepala Daerah terpilih, perubahan nomenklatur pada DInas Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 serta perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan, membuat penyusunan RENSTRA Revisi DInas Komunikasi dan Informatika ini menjadi penting sebagai acuan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika.

Dengan disusunnya RENSTRA revisi ini, maka RENSTRA yang telah disusun sebelumnya oleh Dinas Kominfo tidak lagi menjadi acuan arah pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi. RENSTRA revisi akan menjadi acuan bagi arah pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi yang dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan aparatur Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, Oktober 2018
Kepala Dinas,

Johan Arifin, AP, MM
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19750328 199501 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iv**

Daftar Gambar ..... **v**

Daftar Lampiran ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA **6**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika 6

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 9

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 13

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA **24**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 24

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 26

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 31

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 33

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **37**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA **39**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **42**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 57

BAB VIII PENUTUP 60

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 7

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 10

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ... 10

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 14

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 17

Tabel 2.6 Analisis SWOT 22

Tabel 3.1 Keterkaitan Renstra Diskominfo dan Sasaran Strategis Misi Keempat RPJMD 26

Tabel 3.2 Keterkaitan Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 27

Tabel 3.3 Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru..... 28

Tabel 3.4 Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Isu KLHS 31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru 37

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 39

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru 45

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2016 8

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 85 Tahun 2017 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
Lampiran 2	Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2021
Lampiran 3	Cascading DInas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021
Lampiran 4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Lampiran 5	Manual Perhitungan Indikator Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Lampiran 6	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Banjarbaru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang telah direvisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru bertanggungjawab terhadap urusan Komunikasi dan Informatika yang difokuskan untuk mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yaitu "**Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi**", tujuan 1 "*Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas kkn*" dan sasaran ke 3 : "*Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik*"

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berpedoman kepada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang telah direvisi dan dibuat guna mendukung Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan Visi Kota Banjarbaru yaitu "**Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter**".

Dalam mendukung Visi Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan satu Visi yaitu "**Terwujudnya Pelayanan Publik Yang**

Menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Yang HARAT (HANDAL, AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)" dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK
3. Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK
5. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.

Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publik pun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yang mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government*).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan lima tahunan, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA. Keterkaitan Renstra Diskominfo dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
6. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 TaHUN 2007
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus sebagai acuan kesesuaian dalam menetapkan program/kegiatan, sasaran strategis sekaligus dapat menjadi pedoman bagi arah kebijakan keuangan selama 5 tahun.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru (RPJMD 2016-2021).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telahaan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Strategi dan arah kebijakan yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai misi keempat Pemerintah Kota Banjarbaru

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun serta perkiraan pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 serta Indikator Kinerja Utama(IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berdasarkan rencana Program dan Kegiatan selama 5 tahun kedepan (2016-2021)

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah. DInas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Komnikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

- Tugas Pokok :

  Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

- Fungsi :
  a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi
  b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
  c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik dan Persandian ;
  d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
  e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
  f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

- Susunan Organisasi

  Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

  a. Kepala Dinas.

  b. Sekretaris, membawahi :
  1. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan

  c. Kepala Bidang Komunikasi, membawahi :
  1. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Mass Media, dan Pemberdayaan Kelembagaan Informasi.
  2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Komunikasi

d. **Kepala Bidang Informatika,** membawahi:
   1. Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
   2. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Pengembangan Web Pemerintah Daerah
   3. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

e. **Kepala Bidang Statistik dan Persandian,** membawahi:
   1. Kepala Seksi Statistik;
   2. Kepala Seksi Persandian;

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pertengahan tahun 2017, kewenangan penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak lagi berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, karena itu beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja DInas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diubah melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Bidang Komunikasi	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Seksi Pelayanan Informasi dan Mass Media, dan Pemberdayaan Kelembagaan Informasi	Seksi Pelayanan Informasi
Seksi Sarana Prasarana Komunikasi	Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik

- **Struktur Organisasi**

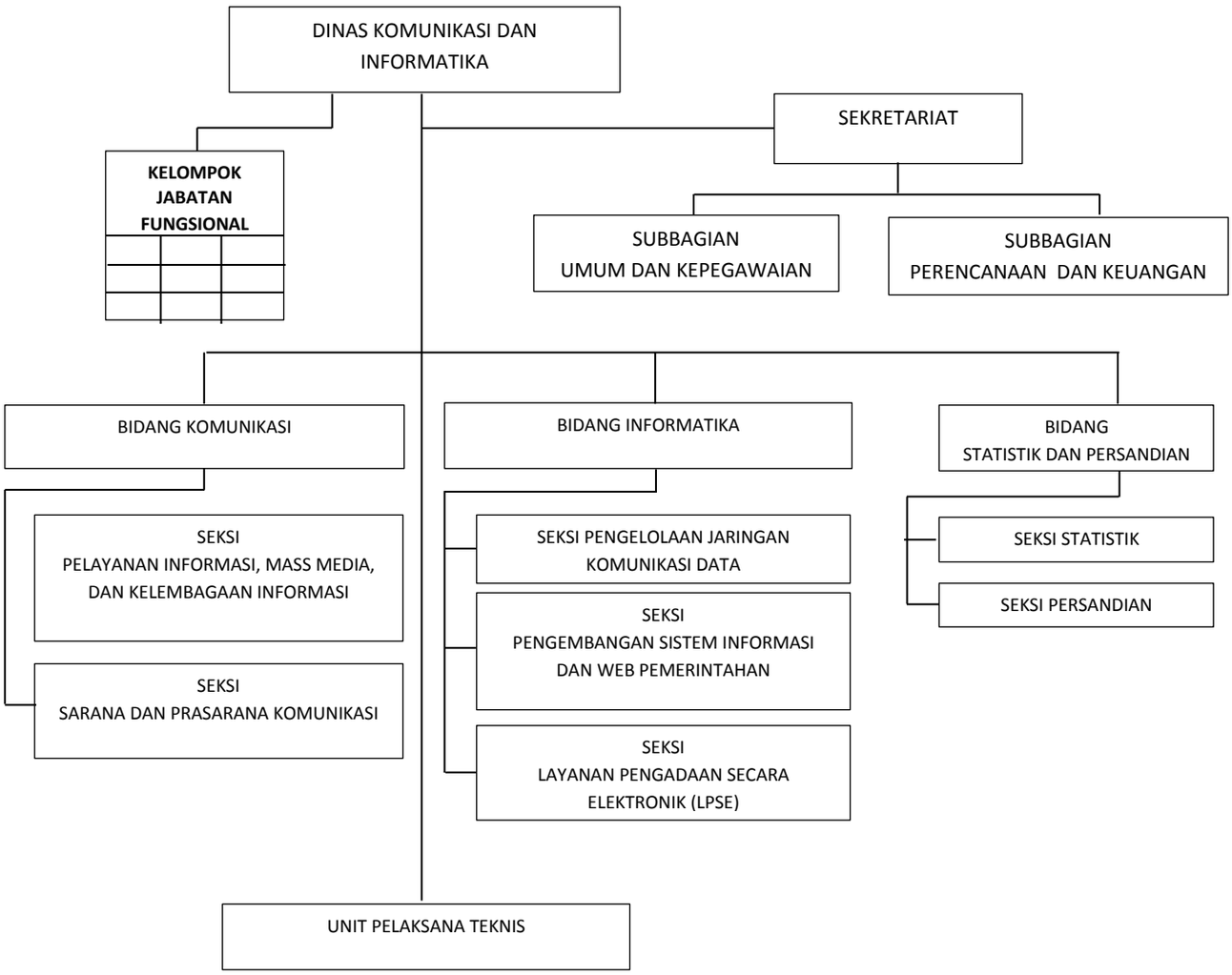

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2016

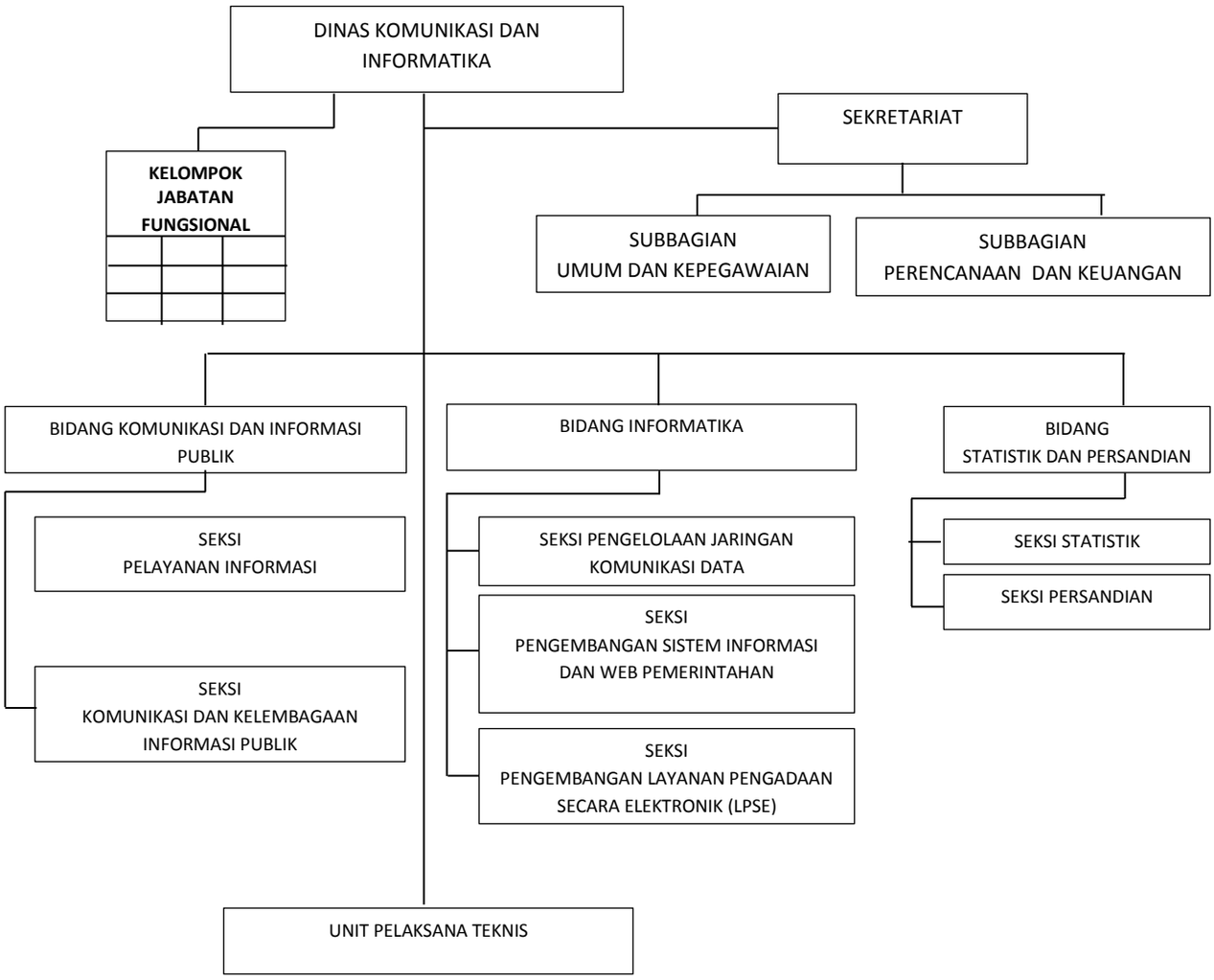

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Berdasarkan Perwali Nomor 85 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 35 orang PNS.

- **Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

  Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan di bidang komunikasi, informatika, serta bidang statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki SDM jumlah sebanyak 35 orang PNS, 2 PTT dan 9 tenaga kontrak terdiri dari:

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Tahun 2018

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	35 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	:	1 orang
Tenaga Kontrak	:	12 orang
Dengan posisi / jabatan sebagai berikut:		
Kepala Dinas (ess. IIb)	:	1 orang
Sekretaris Dinas (ess. IIIa)	:	1 orang
Kabid (ess. IIIb)	:	3 orang
Kasi/Kasubbag (ess. IVa)	:	9 orang
Pejabat Fungional (Pranata komputer)	:	7 orang
Staf PNS / PTT / Tenaga Kontrak	:	27 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan									
SD	**SMP**	**SMA**	**DI**	**DIII**	**DIV**	**S-1**	**S-2**	**S-3**	**Jumlah**
-	-	6		4	-	20	5	-	**35**

Jumlah PTT dan Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan									
SD	**SMP**	**SMA**	**DI**	**DIII**	**DIV**	**S-1**	**S-2**	**S-3**	**Jumlah**
-	**-**	**2**	**1**	**2**	**-**	**8**	**-**	**-**	**13**

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																				
Golongan I					**Golongan II**					**Golongan III**					**Golongan IV**					**Jumlah**
A	**B**	**C**	**D**	**Jlh**	**A**	**B**	**C**	**D**	**Jlh**	**A**	**B**	**C**	**D**	**Jlh**	**A**	**B**	**C**	**D**	**Jlh**	
							4	1		7	7	8	4		2	2				**35**

Jumlah PNS Menurut Gender				**Jumlah**	
PNS		**PTT dan Tenaga Kontrak**			
Laki-laki	**Perempuan**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Laki-laki**	**Perempuan**
18	**17**	**9**	**4**	**27**	**21**

Selain SDM, sumber daya lain yang dapat memberi nilai tambah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, baik karena perubahan SKPD, mutasi SKPD, maupun karena belanja modal berupa :

Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	Nama Barang	Jlh Unit	Keterangan
1.	Sepeda Motor	8	5 karena mutasi SKPD
2.	Global Positioning System (GPS)	3	
3	AC Split	15	
4	Kipas Angin	1	
5	Camera Video	1	
6	Alat Pemadam Portable		
7	Note Book	1	
8	Scanner	1	
9	Peralatan Jaringan Lain-lain	10	
10	Lensa Kamera	1	
11	Gordyn	1	
12	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	

13	UPS	1	
14	Router	1	
15	Radio Access Point	1	
16	Antene	2	
17	Switch Hub	1	
18	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	
19	Kabel Listrik	1	
20	CCTV	4	
21	Sofa	1	
22	Televisi	1	
23	Camera Video	1	
24	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	
25	Server	1	
26	Audio Cassete Recorder	1	
27	Printer	1	
28	Peralatan Listrik	1	
29	Tool Kit Boks	1	
30	Meja Rapat	6	
31	Kursi Rapat	14	
32	Camera Film	1	
33	P.C Unit/ Komputer PC	3	
34	Lap Top	2	
35	Printer	2	
36	UPS	21	
37	Harddisk Internal	3	
38	Harddisk Eksternal	1	
39	Memory	3	
40	Server	3	
41	Router	3	
42	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	
43	Switch Hub	3	
44	Wireless Access Point	2	
45	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	
46	Clearing Instalation	1	
47	Televisi	4	
48	P.C Unit/ Komputer PC	7	
49	Server	1	
50	Alat Pengaman (Sinyal)	2	
51	Meja Panjang	1	
52	Kursi Putar	3	
53	Loudspeaker	1	
54	Sound System	1	
55	P.C Unit/ Komputer PC	8	
56	Stabilizer/Stavolt	1	
57	Power Supply Microphone	1	
58	Facsimile	1	
59	Staion Wagon	2	Mutasi tambah antar SKPD
60	Toner Printer Laser	1	
61	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	2	Belanja Modal tahun 2017
62	Alat Penyimpanan Lain-lain	1	Belanja Modal tahun 2017
63	Lemari Besi	3	Belanja Modal tahun 2017
64	Filling Besi/Metal	4	Belanja Modal tahun 2017
65	Lemari Kaca	1	Belanja Modal tahun 2017
66	Mesin Absensi	1	Belanja Modal tahun 2017
67	Meja Kayu/Rotan	1	Belanja Modal tahun 2017
68	Meja Reseption	1	Belanja Modal tahun 2017

69	Meja Tambahan	2	Belanja Modal tahun 2017
70	Meja Bundar	2	Belanja Modal tahun 2017
71	Kursi Kerja	1	Belanja Modal tahun 2017
72	AC Unit	1	Belanja Modal tahun 2017
73	Alat Pendingin Lain-lain	2	Belanja Modal tahun 2017
74	Radio	1	Belanja Modal tahun 2017
75	Televisi	1	Belanja Modal tahun 2017
76	Sound System	1	Belanja Modal tahun 2017
77	Wireless	1	Belanja Modal tahun 2017
78	Microphone	1	Belanja Modal tahun 2017
79	Camera Film	2	Belanja Modal tahun 2017
80	Tangga Alumunium	1	Belanja Modal tahun 2017
81	Tandon Air	1	Belanja Modal tahun 2017
82	P.C Unit/ Komputer PC	4	Belanja Modal tahun 2017
83	Lap Top	19	Belanja Modal tahun 2017
84	Note Book	2	Belanja Modal tahun 2017
85	Printer	7	Belanja Modal tahun 2017
86	UPS	1	Belanja Modal tahun 2017
87	Memory	4	Belanja Modal tahun 2017
88	Power Supply	1	Belanja Modal tahun 2017
89	Router	1	Belanja Modal tahun 2017
90	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Belanja Modal tahun 2017
91	Switch Hub	1	Belanja Modal tahun 2017
92	Wireless Access Point	2	Belanja Modal tahun 2017
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Belanja Modal tahun 2017
94	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Belanja Modal tahun 2017
95	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	Belanja Modal tahun 2017
96	Meja Kerja	27	Belanja Modal tahun 2017
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Belanja Modal tahun 2017
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Belanja Modal tahun 2017
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Belanja Modal tahun 2017
100	Layar Proyektor	1	Belanja Modal tahun 2017
101	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2	Belanja Modal tahun 2017
102	Film Projector	1	Belanja Modal tahun 2017
103	Camera Film	1	Belanja Modal tahun 2017
104	Lensa Kamera	1	Belanja Modal tahun 2017
105	Lighting Head Body	1	Belanja Modal tahun 2017
106	Alat Penyimpan Data	2	Belanja Modal tahun 2017
107	Pesawat Telephone	1	Belanja Modal tahun 2017
108	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	4	Belanja Modal tahun 2017
109	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	1	Belanja Modal tahun 2017
110	Stabilizer	1	Belanja Modal tahun 2017
111	Baterai	1	Belanja Modal tahun 2017
112	Ember Plastik	1	Belanja Modal tahun 2017
113	Garpu	1	Belanja Modal tahun 2017
114	Papan Nama Instansi	1	Belanja Modal tahun 2017
115	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Belanja Modal tahun 2017
116	Kursi Kerja	1	Belanja Modal tahun 2017
117	Taplak Meja	1	Belanja Modal tahun 2017
118	Jam Elektronik	1	Belanja Modal tahun 2017
119	Kompor Gas	1	Belanja Modal tahun 2017
120	Dispenser	1	Belanja Modal tahun 2017
121	Radio	1	Belanja Modal tahun 2017
122	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Belanja Modal tahun 2017
123	Selang Penyemprot Air	1	Belanja Modal tahun 2017
124	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Belanja Modal tahun 2017

125	Lighting Stand Tripod	1	Belanja Modal tahun 2017
126	Mangkok Porselin	1	Belanja Modal tahun 2017
127	Kabel Listril	1	Belanja Modal tahun 2017
128	Gelas minum	1	Belanja Modal tahun 2017
129	Pisau	1	Belanja Modal tahun 2017
130	Gelas Penutup	1	Belanja Modal tahun 2017
131	Buku Laporan Lain-lain	1	Belanja Modal tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan nomenklatur baru yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada RJPMD Kota Banjarbaru 2016-2021 juga pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008). Selain itu, kinerja Dinas Kominfo juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pencapaian kinerja Diskominfo Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(!2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	I. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																		
	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian Informasi nasional/daerah melalui;																		
	a. Media baru seperti website(online)				365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	365 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Melalui media tradisional seperti: Pertunjukkan rakyat					2	2	3	3		2	2	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Media Interpersonal seperti : saresehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya					1	1	2	2		1	1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Media luar ruang seperti; buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho				2	5	5	6	6		2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
	II. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat																		
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan			Persentase KIM yang terbentuk dan terbina di tingkat kelurahan	15%	40%	65%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(!2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
	Persentase informasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah			Prosentase badan publik lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang menyampaikan informasi publik sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008	10%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
	Persentase penyelenggaraan layanan publik, kegiatan, kelembagaan di lingkungan Pemda Kab/Kota menggunakan domain resmi instansi penyelenggara			Persentase website unit kerja yang aktif dan menggunakan domain banjarbarukota. go.id	29%	43%	58%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kab/Kota																		
	Indeks SPBE				1.15	2	2.5	3	3.5	3.6	3.7	3.8	4	4.2	5	5	5	5	5

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(!2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)																		
	Bidang Statistik																		
	a. Buku "Kabupaten Dalam Angka"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Buku "PDRB"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Persandian																		
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				16%	31%	47%	78%	100%	16%	31%	47%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Urusan Komunikasi dan Informasi	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata PErtumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Pegawai	3,052,021,000	3,205,000,000	3,365,000,000	3,533,000,000	3,710,000,000	2,630,691,431	3,205,000,000	3,365,000,000	3,533,000,000	3,710,000,000	86.20%	100	100	100	100	3,373,004,200	80.17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	983,901,880	10,697,845,995	1,155,000,000	1,180,500,000	1,240,000,000	801,375,960	10,697,845,995	1,155,000,000	1,180,500,000	1,240,000,000	81.45%	100	100	100	100	3,051,449,575	80.16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,105,402,525	229,731,550	273,000,000	305,000,000	337,000,000	1,005,538,735	229,731,550	273,000,000	305,000,000	337,000,000	90.97%	100	100	100	100	450,026,815	80.18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	123,359,955					99,230,000					80.44%					123,359,955	80.44
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28,639,900	31,998,000	45,000,000	55,000,000	55,000,000	27,392,600	31,998,000	45,000,000	55,000,000	55,000,000	95.64%	100	100	100	100	43,127,580	80.19

Urusan Komunikasi dan Informasi	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata PErtumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	5,110,436,500					4,342,617,123					84.98%					5,110,436,500	84.98
Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	300,000,000					266,039,000					88.68%					300,000,000	88.68
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	20,000,000					10,940,000					54.70%					20,000,000	0.55
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1,571,614,900					1,556,502,261					99.04%					1,571,614,900	99,04
Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik	32,125,000					32,125,000					100.00%					290,425,000	80.20
Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	n/a	5,013,958,880	9,850,000,000	7,540,000,000	3,237,000,000	n/a	5,013,958,880	9,850,000,000	7,540,000,000	3,237,000,000	n/a	100	100	100	100	6,410,239,720	100.00

Urusan Komunikasi dan Informasi	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata PErtumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Layanan Penyediaan Infomrasii Publik Pemerintah Daerah	n/a	40.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	n/a	40.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	94.41%	100	100	100	100	327,821,960	80.19
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	14,997,500	140,112,300	405,000,000	510,000,000	569,000,000	14,159,000	140,112,300	405,000,000	510,000,000	569,000,000	94.41%	100	100	100	100	327,821,960	80.19
Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah	n/a	531,113,700	615,000,000	710,000,000	782,000,000	n/a	531,113,700	615,000,000	710,000,000	782,000,000	n/a	100	100	100	100	659,528,425	100.00
Program Pengembangan Persandian Nasional	n/a	119,418,000	183,000,000	239,000,000	239,000,000	n/a	119,418,000	183,000,000	239,000,000	239,000,000	n/a	100	100	100	100	195,104,500	100.00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	221,438,500	156,599,225	172,000,000	190,000,000	208,000,000	217,471,500	156,599,225	172,000,000	190,000,000	208,000,000	98.21%	100	100	100	100	189,607,545	80.20

Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan TIK	n/a	47,500,000	9,850,000,000	7,540,000,000	3,237,000,000	n/a	47,500,000	9,850,000,000	7,540,000,000	3,237,000,000	n/a	100	100	100	100	5,168,625,000	100.00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju kota Banjarbaru sebagai kota jasa yang diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Banjarbaru dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Adanya dukungan sarana Informasi (surat kabar, radio dan TV) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, banyaknya bermunculan tower atau menara telekomunikasi di Kota Banjarbaru yang harus ditata dan diatur keberadaannya.
2. Informasi program kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru
3. Koneksitas internet di SKPD masih belum optimal
4. Mengintegrasikan aplikasi yang telah ada di SKPD dalam mendukung SPBE
5. Me-*manage* aplikasi yang akan dibuat SKPD agar sesuai dengan Masterplan TIK Kota Banjarbaru yang telah dibuat.
6. Pengelolaan website Pemerintahan secara terintegrasi
7. Jaminan keamanan penggunaan TIK pada Pemerintah Kota Banjarbaru
8. Meminimalisir kesenjangan kemampuan TIK aparatur dan masyarakat di Kota Banjarbaru

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah
- Memaksimalkan pelayanan informasi melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (internet, media center, pelayanan pengaduan publik, dll)
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kelompok Informasi Masyarakat
- Meningkatkan bandwith yang ada sehingga dapat diakses secara maksimal

Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi Kalsel

Secara substansi, hubungan RENSTRA Diskominfo Kota Banjarbaru dengan RENSTRA Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra KEMKOMINFO ada pada tujuan pemanfaatan teknologi Informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Analisis SWOT

ALI / ALE	**Kekuatan/Strenght**	**Kelemahan/Weakness**
	Sumber daya aparatur yang memadai 2. Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif 4. Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi.	1. SOP belum tersedia 2. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik 3. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah 4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai 5. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
Peluang/Oportunity	**Strategi (S – O)**	**Strategi (W – O)**
1. Adanya Bandara dan Kemudahan akses menuju Pelabuhan Trisakti 2. Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian 3. Pengembangan kota jasa yang profesional 4. Pusat pendidikan, pereko-nomian dan Perdagangan yang luas 5. Adanya pelimpahan urusan /kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.	1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas 2. Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pegembangan Kota Bandung sebagai kota jasa. 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. 4. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian.	1. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif 2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
Ancaman/Threat	**Strategi (S – T)**	**Strategi (W – T)**
1. Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan	1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui	1. Perbaikan manajemen layanan publik berbasis *reinventing government* 2. Peningkatan partisipasi

kelompok. 2. Krisis keuangan global. 3. Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 4. Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM. **5.** Penurunan luas lahan	pemanfaatan kecen-derungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 2. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan	masyarakat dalam pembangunan.	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kondisi atau gambaran umum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

a. Belum semua unit kerja memiliki jalur koneksitas
b. Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
c. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat
d. Masih kurangnya sarana Komunikasi dan Informatika
e. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi
f. Terbatasnya tenaga teknis bidang IT
g. Masih kurang diberdayakannya Kelompok Informasi Masyarakat
h. Belum tersedianya *data center* yang melayani penyimpanan data digital bagi SKPD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan *common data base system* informasi bagi semua entitas
i. Masih banyak unit kerja yang belum memanfaatkan secara maksimal ketersediaan sub domain banjarbarukota.go.id
j. Bandwidth internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo besarannya belum memadai
k. belum ada jalur *backup* jaringan internet di Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru
l. Infrastruktur Jaringan belum menerapkan mekanisme *Firewall* dan *Proxy server* untuk memberikan keamanan akses internet
m. Keamanan infrastruktur baru ditetapkan secara terbatas
n. Banyak infrastruktur yang informasi penting dan kemampuan pengelolaannya masih diserahkan ke pihak ketiga tanpa ada tenaga ahli yang memadai dari pihak internal Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga jika terjadi masalah dengan pihak ketiga, menimbulkan potensi terganggunya layanan infrastruktur.
o. penggunaan infrastruktur juga masih ada yang belum optimal, misalnya beberapa server hanya diisi dengan aplikasi website saja, belum dimanfaatkan untuk server penyimpanan aplikasi transaksi operasional pemerintahan.

p. PPID yang telah terbentuk belum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung terwujudnya Keterbukaan Informasi sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

3.2 Telahaan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2016-2021 adalah

"**Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter**".

Untuk menunjang visi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan pada misi ke 4 yaitu : "**Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi**"

Pada misi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menunjang Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya pemerintahan Kota Banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN.

Sasaran :

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik.

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Banjarbaru serta RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu :

- Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikutserta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru
- Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
- Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 3.1 Keterkaitan Renstra Diskominfo dan Sasaran Strategis Misi Keempat RPJMD

No	SASARAN STRATEGIS	BIDANG	SASARAN STRATEGIS SETIAP BIDANG	PROGRAM
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
				Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
		PERENCANAAN	Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah
		PENGAWASAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		PELAPORAN		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		KEPEGAWAIAN		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		TATA KELOLA		Penataan Peraturan Perundang Undangan
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
		KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PENGAWASAN	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH
		PELAPORAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		PENGAWASAN	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH
		PELAPORAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	TATA KELOLA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
		LAYANAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan
		KEPENDUDUKAN		Penataan Administrasi Kependudukan
		PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan terpadu satu pintu	Peningkatan Pelayanan Masyarakat

		KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)
		KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Standardisasi Pelayanan Kesehatan
		KERJASAMA		Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3	TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	TATA KELOLA TIK	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
				Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
			Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan TIK	Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
				Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan TIK	Pengembangan Persandian Nasional
				Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
				Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
				Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Keterkaitan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Provinsi Kalsel dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2015-2018	Sasaran Strategis Diskominfo Provinsi Kalsel Tahun 2017-2021	Sasaran Strategis Diskominfo Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Provinsi Kalsel	Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan TIK
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Provinsi Kalsel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan TIK
	Meningkatnya kualitas e-Government di Provinsi Kalsel	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK
	Meningkatnya kualitas layanan informasi public dan statistic sektoral di Provinsi Kalsel	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik
Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Provinsi Kalsel	Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo

Tabel 3.3
Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalsel dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Kementerian Kominfo Tahun 2015-2018	Diskominfo Provinsi Kalsel Tahun 2017-2021	Diskominfo Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021
Sasaran Strategis :	**Sasaran Strategis :**	**Sasaran Strategis :**
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	**Meningkatnya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan persandian di Prov. Kalsel**	**Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan TIK**
Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)	Persentase pemenuhan standar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Prov. Kalsel	persentase Unit kerja yang penyelenggaran pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo
Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)	Persentase SPD yang mengintegrasikan data	
Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia	Persentase peningkatan SPD terhadap keamanan informasi	
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband		
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio		
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	**Meningkatnya kualitas eGovernment di Prov. Kalsel**	**Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK**
Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Ranking pemeringkatan eGovernment Indonesia (PEGI)	Nilai Aspek SPBE
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi		
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi		
Terwujudnya pengentasan kesenjangan digital dan mempertahanan kedaulatan di wilayah 3T dan Lokpri		
Jumlah Kebijakan terkait infrastruktur Penyiaran dan Pita Lebar		
Persentase (%) desa di wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri yang memperoleh akses telekomunikasi bergerak seluler (BTS)		
Jumlah akses internet di lokasi		

layanan publik (antara lain puskesmas, Sekolah, Balai Latihan Kerja, Pariwisata, Sentra Produktif) diprioritaskan pada wilayah Tertinggal/3T dan Perbatasan/Lokpri.		
Presentase (%) Infrastruktur Pemancar Lembaga Penyiaran Publik di daerah 3T yang berfungsi dengan baik		
Persentase (%) penyelesaian Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)		
Terwujudnya peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah 3T dan Perbatasan dengan Penguatan Ekosistem		
Prosentase (%) desa 3T yang bebas buta internet		
Terwujudnya Migrasi TV dari Analog ke Digital		
Jumlah Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran inisiatif DPR		
Prosentase (%) keberhasilan uji coba siaran TV digital		
Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang mendukung keamanan dan ketertiban		
Jumlah Naskah kebijakan di bidang registrasi Kartu Prabayar		
Terwujudnya Ketaatan Penyelenggara Telekomunikasi dalam pemenuhan Pengunaan Produksi dalam Negeri		
Jumlah penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2,1 Ghz yang dilakukan verifikasi terhadap TKDN sesuai amanat regulasi		
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor sektor strategis pemerintah		
Perbaikan Peringkat Indeks ICT Indonesia		
Jumlah technopreneur mandiri yang tercipta		
Jumlah nama domain .id untuk UKM, sekolah, komunitas, dan desa yang diberikan gratis dan dimanfaatkan		
Jumlah Sertifikat Digital		
Jumlah UMKM Go Online		
Jumlah Petani dan Nelayan Go Online		
Jumlah Dokumen Peta ekosistem ekonomi digital		
Jumlah inisiatif roadmap e-Government tahap II yang		

terlaksana		
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	**Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan statistik sektoral di Prov. Kalsel.**	**Meningkatnya kualitas layanan informasi publik**
Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persentase cakupan desiminasi informasi publik ke masyarakat Prov. Kalsel	Persentase pemberdayaan KIM
Persentase (%)Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik		Persentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional
Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat		Persentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan
Persentase (%) Pengelolaan Kanal Informasi Pusat, Daerah dan Mitra;		Persentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID
	Persentase data sektoral Prov. Kalsel yang akurat	Persentase data/informasi statistik sektoral yang update
	Meningkatnya layanan jaringan komunikasi publik di Prov. Kalsel	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan TIK**
	Persentase daerah yang tercover jaringan komunikasi publik	Persentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo
	Persentase peningkatan layanan jaringan komunikasi publik	Persentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE
		Persentase pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo	**Meningkatnya kualitas akuntabilitas Dinas Kominfo Prov. Kalsel**	**Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo**
Persentase (%) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo	Nilai Sakip Dinas Kominfo Prov. Kalsel	Indeks kepuasan pelayanan Diskominfo
Opini atas Laporan Keuangan		
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan		
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat/ditindaklanjuti oleh stakeholder		
Meningkatnya peran Pengembangan SDM dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		
Persentase (%) aparatur yang lulus sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK		
Persentase (%) angkatan kerja yang lulus sertifikasi keahlian dan		

kompetensi sektor TIK berbasis SKKNI		
Jumlah rancangan regulasi SKKNI Bidang Kominfo		
Meningkatnya literasi TIK bagi disabilitas, wanita dan anak usia sekolah		
Jumlah peserta literasi TIK untuk anak-anak usia sekolah, wanita, disabilitas		

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya malaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Stratagis.

Program-program rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah termuat dan bersesuaian dengan program-program pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada semua urusan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2016-2021 disusun pada saat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru belum terbentuk (masih menjadi Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika). Rekomendasi KLHS Tahun 2016-2021 lebih menekankan pada program-program terkait bidang Perhubungan seperti tampak pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.4
Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Isu KLHS

No	Indikasi Program	Deskripsi Pengaruh	Mitigasi
1	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dapat menimbulkan pemcemaran udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan bermotor	Program peningkatan Pelayanan Angkutan perlu adanya ruang hijau jalan/turus jalan, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan pembatasan umur kendaraan yang tidak layak pakai serta penegakan hukum tentang pengujian emisi kendaraan secara berkala dan pelarangan pembuangan sampah di sembarang tempat.
2	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Memiliki pengaruh terkait dengan ketersediaan listik	Untuk kepentingan umum diupayakan oleh Pemerintah dengan bekerjasama/ berkoordinasi dengan instansi

			yang berwenang, sedangkan untuk Badan Usaha yang sifatnya bisnis dapat mengupayakan ketersediaan listrik sendiri. Selain itu perlu diupayakan juga energi listik alternatif
3	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Memiliki pengaruh terkait dengan ketersediaan listik	Untuk kepentingan umum diupayakan oleh Pemerintah dengan bekerjasama/ berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, sedangkan untuk Badan Usaha yang sifatnya bisnis dapat mengupayakan ketersediaan listrik sendiri. Selain itu perlu diupayakan juga energi listik alternatif
4	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Program tersebut dapat memicu terjadinya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA	Diperlukan pengawasan, patroli, sosialisasi penataan peraturan terkait penyalahgunaan narkoba, membuat peraturan sesuai dengan norma setempat, menyelenggarakan layanan pengaduan, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama secara terpadu dengan pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, juga diperlukan peningkatan pendidikan moral dan pendidikan agama.

Namun, dalam proses pelaksanaan dan perumusan substansi KLHS terutama dari hasil pengawasan mutu, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu terkait ketersediaan data oleh Pemerintah.

Rekomendasi perbaikan yang dimaksud yaitu pengadaan data oleh Pemerintah perlu terfokus pada kebutuhan data menyeluruh bagi perumusan kebijakan dan perencanaan, termasuk pengadaan data yang berkelanjutan. Keselarasan waktu serial data dan kesediaan lembaga-lembaga terkait untuk berbagi data sangat berpengaruh pada saat melakukan pengkajian konsistensi keterkaitan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, perlu ada data rinci terkait program-program pilihan yang dinilai relevan dengan isu-isu stratgeis dan memenuhi pronsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan data yang berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK yaitu dengan menyediakan konektivitas antar unit kerja, didukung dengan Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem informasi baik untuk monitoring maupun perumusan kebijakan serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan tersedianya informasi publik khususnya data lintas sektoral.

Untuk pembatasan akses terhadap data dan informasi penting dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) dapat dilaksanakan melalui Program Pengembangan Persandian Nasional.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Ada 11 isu strategis pembangunan Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Belum meratanya kualitas pendidikan.
2. Belum optimalnya peningkatan derjat kesehatan.
3. Belum meratanya kualitas infrastruktur perkotaaan.
4. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
5. Masih rendahnya kualitas lingkungan.
6. Belum tercapainya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
7. Masih Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah.
8. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
9. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
10. Belum optimalnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum, dan
11. Belum Optimalnya penanganan PMKS dan penanganan masyarakat miskin.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah menangani isu strategis terkait **Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,** yaitu dengan "Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi**"** yang merupakan misi keempat Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik dengan Menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi”.

Saat ini, seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, telah melaksanakan reformasi birokrasi. Program

reformasi birokrasi ini telah dilaksanakan secara terstruktur dan massive di seluruh instansi pemerintah dengan kadar yang berbeda-beda.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun di sisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat sehingga, masih memunculkan kesenjangan yang semakin hari semakin bertambah.

e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selama lima tahun terakhir, implementasi *e-government* mulai berkembang di Kota Banjarbaru. Namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi *e-government* semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumberdaya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntanbilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (society participation) dalam proses pembangunan bangsa.

Beberapa negara, termasuk Indonesia meyakini bahwa konsep kota pintar (Smart City) dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah guna memperkuat peran ICT sebagai *enabler* di semua pilar *smart city* dalam menciptakan ekosistem *smart city*, khususnya pada sektor strategis yang dimiliki oleh masing-masing daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden serta Kompas Gramedia menyelenggarakan Gerakan Menuju 100 *Smart City*.

Targetnya, hingga tahun 2019 akan ada 100 daerah (25 kabupaten/kota (2017), 50 kabupaten/kota (2018), 25 kabupaten/kota (2019)) yang menjadi *role model* dalam

implementasi program *smart city*. Pemilihan kabupaten/kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti Kemampuan Keuangan Daerah, Indeks Kota Hijau oleh Kementerian PUPR, Indeks Kinerja Pemerintah Daerah dari Kemendagri, dan Indeks Kota Berkelanjutan (khusus kota) dari Bappenas, visi pemimpin daerah, hingga kesiapan SDM di masing-masing daerah

Hal ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, dimana salah satu fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang komunikasi dan informatika adalah menyelenggarakan sistem informasi *smart city*. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan sebagai *leading sector* dalam implementasi *smart city*.

Selain itu, Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Terwujudnya Banjarbaru Smart City melalui strategi pelayanan berbasis **Information Communication Technology (ICT)** yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan
2. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
3. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
7. Penguatan jalur koneksitas antar unit kerja
8. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota;
9. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
10. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa medatang. Karenanya tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masig misi.

Sedangkan sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organsiasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas kkn	Meningkatnya kualitas Pelayanan Dsikominfo	Indeks Pelayanan Diskominfo	82	83	84	85	86
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	1,15	2	2,5	3	3,5
		Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	persentase unit kerja yang penyelenggaran pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	14	28	36	53	100
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	15,62	31,23	46,87	78,12	100
			Persentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	100	100	100	100	100
			Persentase pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	100	100	100	100	100

		Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	persentase pemberdayaan KIM	100	100	100	100	100
			Persentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional	100	100	100	100	100
			Persentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	100	100	100	100	100
			Persentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	10	80	100	100	100
			Persentase data/informasi statistik sektoral yang update	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada pada penyusunan kegiatan, karenanya harus dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Untuk mencapai misi keempat Pemerintah Kota Banjarbaru, maka strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter			
MISI 4 : **Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas kkn	1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo	Meningkatkan pelayanan internal Diskominfo	• Peningkatan nilai SAKIP
			• Penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
			• Penyediaan laporan keuangan dan aset tepat waktu
			• Meningkatkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti
			• Terlaksananya pemenuhan kebutuhan internal (listrik, air, telekomunikasi, makan-minum, ATK, pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung, mobil jabatan/kendaraan operasional, bahan bacaan dan perundang-undangan, jasa non PNS, jasa kebersihan, barang cetakan, rapat koordinasi dan konsultasi, dll)

	1.2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Pembuatan Master Plan TIK sebagai pedoman pengembangan TIK di Banjarbaru	• Menyiapkan dan menyediakan payung hukum yang memperkuat setiap kebijakan IT di daerah termasuk pemenuhan tuntutan transparansi layanan publik, peningkatan kualitas SDM bidang IT di SKPD dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat
			• Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi agar sesuai dengan Roadmap Pengembangan Aplikasi
			• Penyediaan infrastruktur TIK, Media center, aplikasi pemerintahan dan domain resmi
		Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegritas	• Meningkatkan kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi sarana informasi dan database SKPD untuk meningkatkan kinerja SKPD
	1.3 Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Pengembangan IT melalui penyediaan infrastruktur IT	• Meningkatkan jumlah jaringan radio dan fiber optik yang terpasang dan dapat digunakan beserta pemeliharaannya Meningkatkan SDM Bidang IT sesuai tupoksi SKPD
			• Meningkatkan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi
			• Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan ke depan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik
	1.4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Memperkuat peran persandian dalam mengamankan informasi	• Meningkatkan jumlah pengelola TIK yang mampu melakukan pengamanan informasi elektronik
			• Meningkatkan jumlah pengelola TIK yang mampu mengoperasikan persandian berdasarkan ISO 27001dan indeks KAMMI secara berkelanjutan
			• Meningkatkan jumlah unit kerja terlegalisasi website dengan domain banjarbarukota.go.id
		Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	• Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE

		Meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik	• Membuka layanan partisipasi, aspirasi, pengelolaan opini dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan
			• Meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan aplikasi LAPOR! sebagai sarana pengaduan dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku
	1.5 Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Memaksimalkan sumber daya komunikasi publik di daerah	• Meningkatkan jumlah SDM KIM yang dibina secara berkelanjutan
			• Meningkatkan kerjasama dengan media komunikasi publik
			• Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif untuk menyampaikan isu-isu daerah
		Menguatkan fungsi PPID dan PPIDP sebagai upaya mendukung Keterbukaan Informasi Publik	• Menambah wawasan SKPD tentang UU No.14 Tahun 2008
			• Meningkatkan jumlah sosialisasi serta memaksimalkan penggunaan SIP-PPID sebagai media penyampaian informasi
		Memperkuat fungsi statistik di daerah	Menyajikan informasi publik khususnya data statistik sektoral

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatf. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran,hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

1. SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DISKOMINFO

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Perencanaan dan pelaporan manajemen aset barang
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa non PNS

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2. **SASARAN 2 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN TIK**

   Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

   - Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain serta website dan konten

   Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

   - Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi

3. **SASARAN 3 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN TIK**

   Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

   - Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
   - Penyelenggaraan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah

   Progam Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

   - Promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik

4. **SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN TIK**

   Program Pengembangan Persandian Nasional

   - Pembinaan penyelenggaraan persandian
   - Pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi
   - Perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian

Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

- Penyelenggaraan nama domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemeritah Daerah

- Pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat

5. SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

- Fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi publik
- Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik
- Pelayanan permintaan informasi publik

Program pengembangan data/informasi

- Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
- Penyusunan dan analisis data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
- Penyusunan profil daerah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Kode				Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru efektif, efesien, akuntabel dan bebas kkn	Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan					**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indikator Kinerja :** Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran **Outcome :** Lancarnya Pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran **Output :** Tersedianya Pembayaran Listrik, Air, Telepon, dan Internet, jasa kebersihan, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, barang cetakan dan penggandaan, makan minum rapat dan tamu															
		10	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output :Tersedianya jasa surat-menyurat		12 bln	3,000,000											subbag umpeg	
		10	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output :Tersedianya pembayaran listrik, air, telepon dan internet		12 bln	103,104,000	12 bln	93,912,000	12 bln	150,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	175,000,000	12 bln	175,000,000	subbag umpeg	

		10	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Output :Tersedianya jasa kebersihan Kantor		12 bln	7,200,000	12 bln	14,400,000	12 bln	17,000,000	12 bln	19,000,000	12 bln	21,000,000	12 bln	21,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output :Tersedianya alat tulis kantor		12 bln	115,000,000	12 bln	30,736,800	12 bln	35,000,000	12 bln	40,000,000	12 bln	45,000,000	12 bln	45,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output :Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bln	21,999,900	12 bln	19,332,400	12 bln	20,000,000	12 bln	22,000,000	12 bln	23,000,000	12 bln	23,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12 bln	6,937,700	12 bln	7,840,450	12 bln	10,000,000	12 bln	12,000,000	12 bln	13,000,000	12 bln	13,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output :Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu		12 bln	55,230,000	12 bln	102,675,000	12 bln	106,000,000	12 bln	110,000,000	12 bln	115,000,000	12 bln	115,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-undangan	**Output :** Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		12 bln	6,105,000	12 bln	6,361,200	12 bln	7,000,000	12 bln	7,500,000	12 bln	8,000,000	12 bln	8,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	**Output :** terlaksananya perjalanan dinas luar daera/luar provini, luar daerah/dalam provinsi		12 bln	399,205,280	12 bln	489,846,745	12 bln	500,000,000	12 bln	510,000,000	12 bln	525,000,000	12 bln	525,000,000	subbag umpeg	
		10	01	01	19	Penyediaan Jasa Non PNS	**Output :** Tersedianya honorium jasa non PNS		12 bln	366,120,000	12 bln	304,680,000	12 bln	310,000,000	12 bln	310,000,000	12 bln	315,000,000	12 bln	31,500,000	subbag umpeg	

						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Indikator Kinerja :** Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur **Outcome :** terfasilitasinya mobilitas aparatur **Output :**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur															
						Pembangunan gedung kantor	Output : Tersedianya gedung kantor yang representatif		1 unit	70,900,000												subbag umpeg	
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Output :Tersedianya kendaraan dinas/operasional		12 unit	44,800,000												subbag umpeg	
						Pengadaan mebeleur	Output : Tersedianya mebeleur			216,920,000												subbag umpeg	
		10	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**Output :**Tersedianya perlengkapan gedung kantor		12 bln	166,729,075	12 bln	38,000,000	12 bln	40,000,000	12 bln	43,000,000	12 bln	45,000,000	12 bln	45,000,000	subbag umpeg	
		10	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	**Output :** Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor		12 bln	44,834,950	12 bln	57,717,000	12 bln	65,000,000	12 bln	70,000,000	12 bln	85,000,000	12 bln	85,000,000	subbag umpeg	
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	**Output :** Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			86,470,000												subbag umpeg	
		10	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya BBM		12 bln	41,730,500	12 bln	34,988,500	12 bln	40,000,000	12 bln	45,000,000	12 bln	50,000,000	12 bln	50,000,000	subbag umpeg	
							Tersedianya jasa servis		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
							Tersedianya suku cadang		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			

							Tersedianya perpanjangan STNK		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		10	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
							Tersedianya jasa servis		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
							Tersedianya bahan pelumas		12 bln	74,998,000	12 bln	50,050,000	12 bln	55,000,000	12 bln	60,000,000	12 bln	65,000,000	12 bln	65,000,000	subbag umpeg	
							Tersedianya suku cadang		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
							Tersedianya perpanjangan STNK				1 th											
		10	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perawatan AC dan TV		12 bln	4,630,000	12 bln	12,188,500	12 bln	13,000,000	12 bln	15,000,000	12 bln	17,000,000	12 bln	17,000,000	subbag umpeg	
		10	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perawatan peralatan gedung kantor		1 th	10,800,000	1 th	16,674,700	1 th	20,000,000	1 th	22,000,000	1 th	25,000,000	1 th	25,000,000	subbag umpeg	
		10	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor		1 th	342,590,000	1 th	20,112,850	1 th	40,000,000	1 th	50,000,000	1 th	50,000,000	1 th	50,000,000	subbag umpeg	
						Program Peningkatan disiplin aparatur	Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur														subbag umpeg	
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya			18,359,955											subbag umpeg	
						Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi aparatur		8 org	105,000,000											subbag umpeg	

						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator kinerja : Nilai Evaluasi AKIP Outcome : cakupan laporan kinerja dan keuangan serta presentase tertib administrasi barang/aset daerah Output : Tersedianya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan inventaris barang														
		10	01	06	05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan		1 th	22,579,900	1 th	24,309,400	1 th	30,000,000	1 th	35,000,000	1 th	40,000,000	1 th	40,000,000	subbag perenc. & keu	
		10	01	06	09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset Barang	Tersedianya laporan inventaris barang/aset		1 th	6,060,000	1 th	7,688,600	1 th	8,000,000	1 th	10,000,000	1 th	15,000,000	1 th	15,000,000	subbag perenc. & keu	
	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui TIK					**Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Dearah Melalui Pemanfaatan TIK**	**Indikator Kinerja :** Persentase unit kerja yang terhubung dg Kominfo melalui jaringan FO dan radio **Outcome :** terwujudnya layanan komunikasi dan informasi melalui pemanfaatan TIK														
		10	01	20	02	Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Dearah	**Output :** terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap jaringan internet dan intranet	6 unit kerja	23 uk		45 uk	343,400,000	74 uk	900,000,000	109 uk	900,000,000	144 uk	925,000,000	144 uk	925,000,000	Seksi Jarkomdat	
		10	01	20	03	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	**Output :** Meningkatnya kualitas infrastruktur Data TIK					4,551,038,880	51	8,750,000,000	76	6,400,000,000	100	2,050,000,000	100	2,050,000,000	Seksi Jarkomdat	

		10	01	20	04	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	**Output :** terbentuknya Tim e-government, kerjasama dengan cibilas akademika, digital scanner, perangkat aplikasi mobile, software**Outcome :** Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen					119,520,000		200,000,000		240,000,000		262,000,000		262,000,000	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem	
						Program Pengembangan Persandian Nasional	**Indikator kinerja :** Prosentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah **Outcome** : Terlaksananya Tata Kelola Persandian													
		10	01	25	01	Pembinaan Penyelenggaraan Persandian	**Output :** Tersedianya Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian		n/a		6	62,050,000	15	71,587,500	25	89,484,375	30	111,855,000	30	111,855,000	Seksi Persandian	
		10	01	25	02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	**Output :** tersedianya Sistem Keamanan Informasi yang Berklasifikasi		n/a			43,118,000	15	49,585,700	25	61,982,125	30	77,477,650	30	77,477,650	Seksi Persandian	
		10	01	25	03	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	**Output :** Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang persandian		n/a			14,250,000	15	21,375,000	25	32,062,500	30	50,000,000	30	50,000,000	Seksi Persandian	

						ProgramLayanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah	**Indikator kinerja :** Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan lelang elektronik melalui LPSE sesuai standarisasi LPSE : 2014, Meningkatnya jumlah website yang aktif dan menggunakan domain resmi Outcome : Meningkatnya pelayanan publik melalui SPBE														
		10	01	26	01	Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	**Output** : tersedianya dedicated server, domain dan hosting untuk website				42	95,000,000	53	105,000,000	75	116,000,000	100	127,000,000	100	127,000,000	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem	
		10	01	26	02	Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota	**Output :** Jumlah SKPD yang terlayani dalam pelayanan publik	8	8		9	382,510,000	17	500,000,000	17	582,000,000	17	640,000,000	17	640,000,000	Seksi Pengembangan LPSE	
		10	01	26	03	Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten	**Output** :Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten					6,103,700		10,000,000		12,000,000		15,000,000		15,000,000	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem	
						Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	**Indikator Kinerja :** Prosentase penyelenggaraan pelatihan TI **Outcome :** Meningkatnya kemampuan SDM TI Pemko Banjarbaru														

		10	01	27	07	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik	**Output :** terselenggaranya kegiatan pelatihan					47,500,000		52,250,000		57,475,000		63,222,500		63,222,500	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem	
						Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Indikator kinerja : Prosentase unit kerja yang terhubung dengan diskominfo Outcome : Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa															
						Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Output : Terpasangnya jaringan fiber optik			4,274,694,000											Seksi Jarkomdat	
						Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Output : Terbinanya sumber daya komunikasi dan informasi			101,529,000											Seksi Pengembangan SI dan Web Pem	
						Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Output :Tersedianya regulasi kebijakan bidang komunikasi dan informasi			5,310,000											Seksi Pengembangan SI dan Web Pem	
						Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Ouput :Pembinaan sarana dan prasarana TI			15,000,000											Seksi Sapras Komunikasi	
						pembinaan dan pengmbangan sarana, prasarana persandian	Output : terlaksananya pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana persandian			15,930,000											Seksi persandian	

						perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Output :Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang persandian			7,655,000											Seksi persandian	
						penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik	Output : Jumlah SKPD yang terlayani dalam LPSE			690,318,500											Seksi LPSE	
						Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Indikator kinerja : Tersedianya dokumen perencanaan jaringan Nir kabel dan fiber optik Outcome : Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi															
						Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Output : Tersedianya dokumen masterplan TIK Kota Banjarbaru		1 dok	300,000,000											Seksi Jarkomdat	
	Mewujudkan peningkatan akses dn kualitas layanan publik					**Program Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah**	**Indikator Kinerja :** Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan online sesuai waktu yang ditetapkan **Outcome :** Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran aspirasi, pendapat dan aduannya														
		10	01	21	01	Pemantauan Isu Publik, Pendapat umum dan Aduan Masyarakat	**Output :** terlaksananya kegiatan sosialisasi		100%	23,375,000	100%	40,000,000	100%	460,000,000	100%	460,000,000	100%	460,000,000	100%	460,000,000	Seksi Pelayanan Informasi	

						Program kerjasama informasi dengan mass media	Indikator Kinerja : Terlaksananya kerjasama informasi, teknologi dan sarana dan prasarana TI Outcome : Terlaksananya diseminasi informasi													
						Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Output : kerjasama publikasi kegiatan pemko, lapsus, dan talkshow			1,408,670,000										Seksi Pelayanan informasi, mass media dan kelembagaan informasi	
						pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana teknologi informasi	Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sapras TI			162,944,900										Seksi Sapras Komunikasi	
						Program peningkatan akses dan kualitas informasi public	**Indikator Kinerja :** Prosentase jumlah KIM yang terbentuk dan terbina, Persentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 **Outcome :** Terpenuhinya faslitas sumberdaya Komunikasi Publik													
						Pelayanan Permintaan Informasi Publik	Output : terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan komunikasi publik		32.6	8,750,000										Seksi Pelayanan informasi, mass media dan kelembagaan informasi	

						Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	**Indikator Kinerja :** Prosentase jumlah KIM yang terbentuk dan terbina, Persentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 **Outcome :** Terpenuhinya faslitas sumberdaya Komunikasi Publik														
		10	01	23	01	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	**Output :** Terlaksananya sosialisasi dan terbentuknya KIM		15	14,997,500	40	70,262,500	65	145,000,000	90	210,000,000	100	225,000,000	100	225,000,000	Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	
		10	01	23	02	Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	Output : terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan komunikasi publik				25	29,804,900	50	50,000,000	75	69,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	
		10	01	23	03	Pelayanan Permintaan Informasi Publik	**Output :** terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi publik				42.3	40,044,900	73	210,000,000	80.7	231,000,000	100	254,000,000	100	254,000,000	Seksi Pelayanan Informasi	

						Program Pengembangan Data/Informasi	**Indikator kinerja :** Tersedianya Buku Statistik Banjarbaru dan PDRB **Outcome:** Meningkatnya ketersediaan data/informasi **Output** : Buku Indikator Makro, booklet, leaflet,													
		10	01	24	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	tersusunnya buku statistik Kota Banjarbaru dan penyusunan buku 8 kelompok data penting pembangunan	n/a	37%	77,956,000	50%	75,889,800	75 %	83,478,780	87.50%	91,826,600	100%	101,009,200	100	101,009,200	Seksi Statistik	
		10	01	24	02	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Buku Indikator Makro			62,282,500		60,835,625		66,919,000		73,610,900		80,971,900		80,971,900	Seksi Statistik	
		10	01	24	03	Penyusunan Profile Daerah	booklet dan leaflet			81,200,000		19,873,800		21,861,100		24,047,200		26,451,900		26,451,900	Seksi Statistik	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, ada beberapa indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan. Indikator ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. Tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 serta Indikator Kinerja Utama(IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berdasarkan rencana Program dan Kegiatan selama 5 tahun kedepan. Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Aspek / Fokus / Bidang / Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Persentase indikator SPBE	%	n/a	n/a	23	40	50	60	70	70
Persentase radio dan fiber optik terpasang dan telah digunakan unit kerja	%	n/a	n/a	14	28	36	53	100	100
layananan Internet dengan 1. Dedicated Terpasang dengan SLA maksimal 99% 2. Broadband terpasang	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
Persentase SDM TIK yang kompeten	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
persentase SKPD yang telah mendapat layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi elektronik	%	n/a	n/a	16	31	47	78	100	16
Prosentase unit kerja yang telah menggunakan website dengan domain banjarbarukota.go.id yang aktif	%	n/a	N/A	29	43	58	80	100	100
Persentase pengadaaan barang jasa telah menggunakan LPSE	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase tindaklanjut pengaduan oleh unit kerja yang berwenang	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
Persentase KIM yang dibina	%	N/A	N/A	15	40	65	90	100	100
Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
Persentase isu publik yang ditanggapi oleh masyarakat	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
Persentase PPID Utama dan Pembantu aktif	%	N/A	N/A	10	80	100	100	100	100
Prosentase data/informasi statistik sektoral yang tersedia berdasarkan data sektoral	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
Nilai Sakip SKPD	AA/A/B/CC/C/D	n/a	n/a	B	B	B	A	A	A

Laporan keuangan SKPD tepat waktu	%	n/a	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tindak lanjut temuan SKPD yang telah selesai ditindaklanjuti	%	N/a	N/a	100	100	100	100	100	100
Laporan Aset SKPD tepat waktU	%	N/a	N/a	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Renstra SKPD juga menjadi pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk dan berpedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang harus dilaksanakan. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Banjarbaru merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* menuju terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter.

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran strategis**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Pelayanan Publik belum maksimal	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo	Indeks kepuasan pelayanan Diskominfo	N/a	82	83	84	85	86

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran strategis	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran strategis	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran strategis**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Kurang optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai aspek SPBE	N/A	1,15	2	2,5	3	3,5
			Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	persentase Unit kerja yang penyelenggaran pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	N/A	14	28	36	53	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran strategis**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Persentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	N/A	15,62	31,23	46,87	78,12	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran strategis**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Persentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	N/A	100	100	100	100	100
				Persentase pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	N/A	100	100	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran strategis**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
			Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	persentase pemberdayaan KIM	N/A	100	100	100	100	100
				persentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional	N/A	100	100	100	100	100
				Persentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	N/A	100	100	100	100	100
				Persentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	N/A	10	80	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. II										
Isu Strategis	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran strategis**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
				Persentase data/informasi statistik sektoral yang update	N/A	100	100	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	**Indikator Kinerja outcome**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pelayanan Internal	Nilai Sakip SKPD	N/A	B	B	B	A	A
	Laporan keuangan SKPD tepat waktu	N/A	100	100	100	100	100
	Tindak lanjut temuan SKPD yang telah selesai ditindaklanjuti	N/A	100	100	100	100	100
	Laporan Aset SKPD tepat waktu	N/A	100	100	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	Indikator Kinerja outcome	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)
12	13	14	15	16	17	18	19

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	Indikator Kinerja outcome	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)	Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)
12	13	14	15	16	17	18	19

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	**Indikator Kinerja outcome**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Peningkatan pelaksanaan sistem SPBE (aspek SPBE)	Persentase indikator aspek SPBE	N/a	23	40	50	60	70
Peningkatan jaringan intra Pemerintah Kota Banjarbaru	Persentase radio dan fiber optik terpasang dan telah digunakan unit kerja	N/A	14	28	36	53	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	**Indikator Kinerja outcome**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
	layananan Internet dengan 1. Dedicated Terpasang dengan SLA maksimal 99% 2. Broadband terpasang	N/A	100	100	100	100	100
Peningkatan SDM pengelola TIK unit kerja	Persentase SDM TIK yang kompeten	N/A	100	100	100	100	100
Peningkatan pelayanan penggunaan persandian	persentase SKPD yang telah mendapat layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi elektronik	N/A	16	31	47	78	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	**Indikator Kinerja outcome**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Peningkatan penggunaan website resmi Pemko Banjarbaru	Prosentase unit kerja yang telah menggunakan website dengan domain banjarbarukota.go.id yang aktif	N/A	29	43	58	80	100
Peningkatan penyelenggaraan pengadan barang jasa melalui LPSE	Persentase pengadaan barang jasa telah menggunakan LPSE	N/A	100	100	100	100	100
Peningkatan Tindak lanjut pengaduan masyarakat pada aplikasi LAPOR!	Prosentase tindaklanjut pengaduan oleh unit kerja yang berwenang	N/A	100	100	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	**Indikator Kinerja outcome**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Peningkatan sumber daya KIM	Persentase KIM yang dibina	N/A	15	40	65	90	100
Peningkatan pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik	N/A	100	100	100	100	100
Peningkatan partisipasi masyarakat melalui opini publik	Persentase isu publik yang ditanggapi oleh masyarakat	N/A	100	100	100	100	100
Peningkatan pengelolaan PPID	Persentase PPID Utama dan Pembantu aktif	N/A	10	80	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES.III							
Kinerja outcome	**Indikator Kinerja outcome**	**Kondisi Awal (Tahun 2016)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2017)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2018)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2019)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2020)**	**Target Indikator kinerja Sasaran (Tahun 2021)**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Prosentase data/informasi statistik sektoral yang tersedia berdasarkan data sektoral	N/A	100	100	100	100	100

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017-2021

ES. IV																					Keterangan
Kinerja output	Indikator Kinerja output	program (2017	Kegiatan (2017)	Tahun-1 (2017)		nama program (2017)	nama kegiatan (2017)	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Tahun ke-1 (2017)		nama program (2018-2021)	nama kegiatan (2018-2021)	Tahun ke-2 (2018)		Tahun ke-3 (2019)		Tahun ke-4 (2020)		Tahun ke-5 (2021)		
				Target	Rp				Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
20	21	22	23	24	25	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Pembuatan laporan kinerja	Laporan Kinerja	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	3,000,000	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan keuangan	N/A	1 dokumen		**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan keuangan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
Terlaksananya penatausahaan keuangan sesuai undang-undang	Laporan keuangan							N/A	1 dokumen	22,579,900			1 dokumen	24,309,400	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	40,000,000	subbag perencanaan dan keu
Terlaksananya evaluasi internal	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti							N/A	100				100		100		100		100		
Terlaksananya penatausahaan aset/barang sesuai undang-undang	Laporan Aset SKPD		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	103,104,000	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	N/A	1 dokumen	6,060,000	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	1 dokumen	7,688,600	1 dokumen	8,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	15,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah dibayar						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	N/A	3 rekening	103,104,000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	93,912,000	3 rekening	150,000,000	3 rekening	150,000,000	3 rekening	175,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor yang telah dibayar						Penyediaan jasa kebersihan kantor	N/A	1 orang	7,200,000		Penyediaan jasa kebersihan kantor	2 orang	14,400,000	2 orang	17,000,000	3 orang	19,000,000	3 orang	21,000,000	subbag umpeg
Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang sudah digunakan						Penyediaan Alat Tulis Kantor	N/A	100	15,000,000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	30,736,800	100	35,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	subbag umpeg
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang sudah digunakan						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	100	21,999,900		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	19,332,400	100	20,000,000	100	22,000,000	100	23,000,000	subbag umpeg
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah digunakan						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	100	6,937,700		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	7,840,450	100	10,000,000	100	12,000,000	100	13,000,000	subbag umpeg

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang sudah digunakan						Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	N/A	100	6,105,000		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	100	6,361,200	100	7,000,000	100	7,500,000	100	8,000,000	subbag umpeg
Tersedianya makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan selama 1 tahun						Penyediaan makanan dan minuman	N/A	100	55,230,000		Penyediaan makanan dan minuman	100	102,675,000	100	106,000,000	100	110,000,000	100	115,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	N/A	12 bulan	399,205,280		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	489,846,745	12 bulan	500,000,000	12 bulan	510,000,000	12 bulan	525,000,000	subbag umpeg
Tersedianya jasa non PNS	jasa non PNS yang telah dibayarkan						Penyediaan jasa non PNS	N/A	100	366,120,000		Penyediaan jasa non PNS	100	304,680,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	315,000,000	subbag umpeg
Tersedianya jasa surat menyurat	jasa surat menyurat yang dibayarkan						Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	100	3,000,000											subbag umpeg
Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor					**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	N/A	100	166,729,075	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	38,000,000	100	40,000,000	100	43,000,000	100	45,000,000	subbag umpeg
Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor						Pengadaan peralatan gedung kantor	N/A	100	44,834,950		Pengadaan peralatan gedung kantor	100	57,717,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	85,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	N/A	100	41,730,500		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100	34,988,500	100	40,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	N/A	100	74,998,000		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	50,050,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	N/A	100	4,630,000		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100	12,188,500	100	13,000,000	100	15,000,000	100	17,000,000	subbag umpeg

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	N/A	100	10,800,000		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	16,674,700	100	20,000,000	100	22,000,000	100	25,000,000	subbag umpeg
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor						Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	N/A	100	342,590,000		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100	20,112,850	100	40,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	subbag umpeg
Tersedianya gedung kantor	jumlah gedung						pembangunan gedung kantor	N/A	1 unit	70,900,000											subbag umpeg
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	jumlah gedung dalam kondisi baik						pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor	N/A	12 bulan	86,470,000											subbag umpeg
Tersedianya kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional						pengadaan kendaraan dinas/operasional	N/A	12 unit	44,800,000											subbag umpeg
Tersedianya mebeleur	jumlah mebeleur						pengadaan mebeleur	N/A		216,920,000											subbag umpeg
Terlaksananya penerapan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru	Prosentase Aplikasi yang digunakan dalam SPBE	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		5,310,000	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	N/A	40	5,310,000	**Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah**	Perumusan Regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain, serta website dan konten	50	6,103,700	60	10,000,000	70	12,000,000	80	15,000,000	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem
Terlaksananya pengembangan aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegritas							N/A	1		**Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK**	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	2	119,520,000	3	200,000,000	4	240,000,000	5	262,000,000	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem
1. Terlaksananya pemasangan jaringan baru 2. Terlaksananya pemeliharaan jaringan	1. Jumlah jaringan radio dan fiber optik terpasang dan dapat digunakan. 2. Prosentase perangkat jaringan dalam kondisi baik	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	23 uk	4,274,694,000	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	N/A N/A	20 100	4,274,694,000	**Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Peningkatan TIK**	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	40 100	4,551,038,880	52 100	8,750,000,000	76 100	6,400,000,000	143 100	2,050,000,000	Seksi Jarkomdat

						Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	N/A	1 dok	300,000,000											Seksi Jarkomdat
												Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Dearah	4	343,400,000	5	900,000,000	6	900,000,000	7	925,000,000	Seksi Jarkomdat
Terlaksananya pelatihan TIK	Jumlah pengelola TIK yang dapat mengoperasionalkan TIK berkelanjutan					**Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	N/A	32	20,000,000	**Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK**	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik	69	47,500,000	84	52,250,000	84	57,475,000	84	63,222,500	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem
Terlaksananya monitoring pengamanan informasi elektronik	Jumlah pengelola TIK telah melakukan pengamanan informasi elektronik					**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	N/A	10	7,655,000	**Program Pengembangan Persandian Nasional**	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	20	14,250,000	30	21,375,000	50	32,062,500	64	50,000,000	Seksi Persandian
Terlaksanaan pembinaan persandian	Jumlah Pengelola TIK yang mampu mengoperasional persandian berdasarkan ISO 27001 secara berkelanjutan						Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana persandian	N/A	10	15,930,000		Pembinaan Penyelenggaraan Persandian	20	62,050,000	30	71,587,500	50	89,484,375	64	111,855,000	Seksi Persandian
Terlaksananya penggunaan layanan persandian berklasifikasi	Jumlah Pengelola TIK yang mampu mengoperasional persandian berdasarkan indeks KAMMI secara berkelanjutan							N/A	10			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	20	43,118,000	30	49,585,700	50	61,982,125	64	77,477,650	Seksi Persandian

Terselenggaranya Legalisasi website resmi unit kerja	Jumlah unit kerja terlegalisasi website dengan domain banjarbarukota.go.id	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	20	101,529,000	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	N/A	20	101,529,000	**Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah**	Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	25	95,000,000	32	105,000,000	45	116,000,000	60	127,000,000	Seksi Pengembangan SI dan Web Pem
Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang jasa melalui LPSE	Jumlah pengadaan barang jasa yang prosesnya melalui LPSE	**Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Penyelenggaraan Sistem layanan pengadaan secara elektronik	8	690,318,500	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik	100	100	690,318,500		Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	382,510,000	100	500,000,000	100	582,000,000	100	640,000,000	Seksi LPSE
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana TI di Pemko Banjarbaru	Cakupan pengawasan sarana dan prasarana TI	**Program Kerjasama Informasi dengan mass media**	Pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana TI	100%	162,944,900							Seksi Sapras TI								
Memproses tindaklanjut pengaduan	Jumlah aduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! Yang diproses.	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana TI	100%	15,000,000	**Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik**	Pemantauan isu umum dan aduan masyarakat	N/A	100	23,375,000	**Penyediaan informasi publik pemerintah daerah**	Pemantau Isu Publik, Pendapat umum dan Aduan Masyarakat	100	40,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000	Seksi Pelayanan Informasi
					1,409															
					163															
					9															
					23															
terlaksananya pembinaan SDM KIM	Jumlah SDM KIM yang dibina secara berkelanjutan	**Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	15	14,997,500	**Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik Pemerintah Daerah**	Fasilitasi dan konsultasi sumber daya komunikasi publik	N/A	12	14,997,500	**Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	32	70,262,500	52	145,000,000	73	210,000,000	80	225,000,000	Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik
terlaksananya kerjasama dengan media komunikasi publik	jumlah kerjasama dengan media komunikasi publik					**Program kerjasama informasi dengan mass media**	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	11	19	1,408,670,000		Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	1	29,804,900	1	50,000,000	1	69,000,000	1	90,000,000	Seksi Komunikasi dan Kelembagaan

Terlaksananya penyampaian isu publik	Jumlah isu publik yang disampaikan							N/A	2				4		6		12		24		Informasi Publik
1.Terlaksanaan ya pemberian informasi publik 2.Terlaksanaan ya pengelolaan saluran Komunikasi publik website SIP-PPID	1.Jumlah sosialisasi informasi publik yang dilaksanakan 2.Jumlah informasi PPIDP yang diupload ke aplikasi SIP-PPID	**Program Pengembangan Data/Informasi**	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	37%	77,956,000	**Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik**	pelayanan permintaan informasi publik	N/A N/A	2 88	8,750,000		Pelayanan Permintaan Informasi Publik	5 850	40,044,900	5 900	210,000,000	6 950	231,000,000	6 1000	254,000,000	Seksi Pelayanan Informasi
Terlaksananya Pengumpulan dan penyusunan data sektoral, pembangunan ekonomi.	jumlah Data statistik kota Banjarbaru yang terupdate dan terdistribusi		Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi		62,282,500	**Pengembangan Data/Informasi**	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	N/A	10	77,956,000	**Pengembangan Data/Informasi**	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	10	75,889,800	10	83,478,780	10	91,826,600	10	101,009,200	Seksi Statistik
	jumlah data hasil pengolahan data informasi pembangunan ekonomi		Penyusunan Profile Daerah		81,200,000		Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	N/a	9	62,282,500		Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	9	60,835,625	9	66,919,000	9	73,610,900	9	80,971,900	Seksi Statistik
Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi daerah/ nasional	cakupan wilayah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Kerjasama informasi dengan mass media**	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	1,408,670,000		Penyusunan Profile Daerah					Penyusunan Profile Daerah		19,873,800							
Meningkatnya penyajian data statistik sektoral berbasis TI	Jumlah unit kerja dan lembaga lain yang menerima Buku Statistik Kota banjarbaru	**Program Pengembangan Data/Informasi**	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	37%	77,956,000		Seksi Statistik					Seksi Statistik									
	Jumlah buku indikator makro ekonomi Kota Banjarbaru yang disebarkan ke unit kerja		Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi		62,282,500		Seksi Statistik					Seksi Statistik									

	Jumlah buku selayang pandang dan leaflet yang terdistribusikan ke berbagai lapisan masyarakat		Penyusunan Profile Daerah		81,200,000		Seksi Statistik					Seksi Statistik									
	jumlah Data statistik kota Banjarbaru yang ter update						Penyusunan Profile Daerah	N/A	17	81,200,000		Penyusunan Profile Daerah	17	19,873,800	17	21,861,100	17	24,047,200	17	26,451,900	Seksi Statistik

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018-2021

VISI KOTA BANJARBARU	TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER
MISI KOTA BANJARBARU	MISI KE-4 : "Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi"
TUJUAN (RPJMD)	Tujuan 5 : Terwujudnya pemerintahan kota banjarbaru yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN
SASARAN (RPJMD)	Sasaran 5.3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, Akses dan Kualitas Layanan Informasi Publik dengan Menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Indikator Sasaran : indeks SPBE
VISI KOMINFO	"TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG HARAT (HANDAL, AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)"

MISI KOMINFO (SASARAN DINAS) ES II	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Meningkatnya kualitas pelayanan Diskominfo
INDIKATOR DINAS	Nilai Aspek SPBE	persentase Unit kerja yang penyelenggaran pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	1. Persentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo 2. Persentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE 3. Persentase pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	1. persentase pemberdayaan KIM 2. Persentase informasi pembangunan kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional 3. Persentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan 4. Persentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID 5. Persentase data/informasi statistik sektoral yang update	Indeks kepuasan pelayanan Diskominfo

SASARAN PROGRAM (ES III)	Peningkatan pelaksanaan sistem SPBE (aspek SPBE)	Peningkatan jaringan intra Pemerintah Kota Banjarbaru		Peningkatan SDM pengelola TIK untik kerja	Peningkatan pelayanan penggunaan persandian	Peningkatan penggunaan website resmi Pemko Banjarbaru	Peningkatan penyelenggaraan pengadaan barang jasa melalui LPSE	Peningkatan Tindak lanjut pengaduan masyarakat pada aplikasi LAPOR!	Peningkatan sumber daya KIM	Peningkatan PPID	1. Peningkatan pemanfaatan saluran media komunikasi publik 2. Peningkatan partisipaso masyarakat melalui sosial publik	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pelayanan Internal
INDIKATOR PROGRAM	Persentase indikator SPBE	Persentase radio dan fiber optik terpasang dan telah digunakan unit kerja	layanan Internet dengan 1. Dedicated Terpasang dengan SLA minimal 99% 2. Broadband terpasang	Persentase SDM TIK yang kompeten	persentase SKPD yang telah mendapat layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi elektronik	Prosentase unit kerja yang telah menggunakan website dengan domain banjarbarukota.go.id yang aktif	Persentase pengadaan barang jasa telah menggunakan LPSE	Prosentase tindaklanjut pengaduan oleh unit kerja yang berwenang	Persentase KIM yang dibina	Persentase PPID Utama dan Pembantu aktif	1. Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik 2. Persentase isu publik yang ditanggapi oleh masyarakat	Prosentase data/informasi statistik sektoral yang tersedia berdasarkan data sektoral	1. Nilai Sakip SKPD 2. Laporan keuangan SKPD tepat waktu 3. Tindak lanjut temuan SKPD yang telah selesai ditindaklanjuti 4. Nilai maturitas SPIP 5. Laporan aset SKPD tepat waktu
NAMA PROGRAM	Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Peningkatan TIK	Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Program Pengembangan Persandian Nasional	Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah		Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN KEGIATAN (ES IV)	Terlaksananya penerapan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru	Terlaksananya pengembangan aplikasi	1. Terlaksananya pemasangan jaringan baru 2. Terlaksananya pemeliharaan jaringan	Terlaksananya penyediaan layanan internet	Terlaksananya pelatihan TIK	Terlaksananya monitoring pengamanan informasi elektronik	Terlaksananya pembinaan penandian	Terlaksananya penggunaan layanan persandian berklasifikasi	Terselenggaranya Legalisasi website resmi unit kerja	Terlaksanaya fasilitasi pengadaan barang jasa melalui LPSE	Meningkatnya tindaklanjut pengaduan	Terlaksananya pembinaan SDM KIM	1.Terlaksanaya penberian informasi publik 2.Terlaksanaya pengelolaan saluran Komunikasi publik website SIP-PPID	Terlaksananya penyampaian isu publik 2.terlaksanaya penyebarluasan informasi pembangunan	Terlaksanaya Pengumpulan dan penyusunan data sektoral, pembangunan elektronic	1.Terlaksanaya evaluasi internal 2. Pembuatan laporan kinerja 3. Terpenuhinya sub unsur SPIP 4Terlaksanaanya ketatausahaan keuangan sesuai undang-undang	1. Terlaksananya penatausahaan aset/barang sesuai undang-undang 2. Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Terlaksananya jasa kebersihan kantor 4. Tersedianya Alat Tulis Kantor 5. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 7. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 8. Tersedianya makanan dan minuman 9. Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Tersedianya jasa non PNS 11. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12. Tersedianya peralatan gedung kantor 13. Terlaksanaanya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14. Terlaksanaanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Terlaksanaanya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16. Terlaksanaanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
INDIKATOR KEGIATAN	Prosentase Aplikasi yang digunakan dalam SPBE	Jumlah aplikasi yang terintegritas	1. Jumlah jaringan radio dan fiber optik terpasang dan dapat digunakan. 2. Prosentase perangkat jaringan dalam kondisi baik	Jumlah kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi	Jumlah SDM TIK yang dapat mengoperasionalkan TIK berkelanjutan	Jumlah pengelola TIK telah melakukan pengamanan informasi elektronik	Jumlah Pengelola TIK yang mampu mengoperasional penandian berdasarkan ISO 27001 secara berkelanjutan	Jumlah Pengelola TIK yang mampu mengoperasionalkan penandian berdasarkan indeks KAMMI secara berkelanjutan	Jumlah unit kerja terlegalkan website dengan domain banjarbarukota.go.id	Prosentase pengadaan barang jasa yang prosesnya melalui LPSE	Prosentase aduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! Yang diproses.	Jumlah SDM KIM yang dibina secara berkelanjutan	1.Jumlah sosialisasi informasi publik yang dilaksanakan 2.Jumlah informasi PPIDP yang diupload ke aplikasi SIP-PPID	1. Jumlah isu publik yang disampaikan 2.jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan	1. Jumlah Data statistik kota Banjarbaru yang terupdate dan terdistribusi 2. jumlah data hasil pengolahan data informasi pembangunan elektronic 3. Jumlah Data statistik kota Banjarbaru yang ter update	1.Jumlah temuan yang ditindaklanjuti 2. Laporan kinerja 3. Dokumen sub unsur SPIP 4. laporan keuangan SKPD tepat waktu	1. Laporan Aset SKPD tepat waktu 2. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah dibayar 3. jasa kebersihan kantor yang telah dibayar 4. Jumlah Alat Tulis Kantor yang sudah digunakan 5. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang sudah digunakan 6. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah digunakan 7. Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang sudah digunakan 8. jumlah makanan dan minuman yang disediakan selama 1 tahun 9. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun 10. jasa non PNS yang telah dibayarkan 11. Jumlah perlengkapan gedung kantor 12. Jumlah peralatan gedung kantor 13. jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik 14. jumlah Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 15. Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik 16. jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 17. jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	SEKSI PENGEMBANGAN SI DAN WEB	SEKSI PENGEMBANGAN SI DAN WEB	SEKSI JARKOMDAT	SEKSI JARKOMDAT	SEKSI PENGEMBANGAN SI DAN WEB	SEKSI PERSANDIAN	SEKSI PERSANDIAN	SEKSI PERSANDIAN	SEKSI PENGEMBANGAN SI DAN WEB	SEKSI PENGEMBANGAN UPSE	SEKSI PELAYANAN INFORMASI	SEKSI KOMUNIKASI DAN KELEMBAGAAN INFORMASI PUBLIK	SEKSI PELAYANAN INFORMASI	SEKSI KOMUNIKASI DAN KELEMBAGAAN INFORMASI PUBLIK	SEKSI STATISTIK	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SUBBAG UMPEG	SUBBAG UMPEG	SUBBAG UMPEG	SUBBAG UMPEG
NAMA KEGIATAN DI RKA	Perumusan Regulasi, kebijakan dan monev di bidang nama domain, sub domain, serta website dan konten	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	Pembinaan Penyelenggaraan Penandian	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi	Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemantau Isu Publik, Pendapat umum dan Aduan Masyarakat	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Pelayanan Permintaan Informasi Publik	Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan keuangan	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
															SEKSI STATISTIK Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Elsinomi		SUBBAG UMPEG Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SUBBAG UMPEG pengadaan peralatan gedung kantor	SUBBAG UMPEG Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SUBBAG UMPEG Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
															SEKSI STATISTIK Penyusunan Profile Daerah		SUBBAG UMPEG Penyediaan jasa kebersihan kantor	SUBBAG UMPEG Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SUBBAG UMPEG Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SUBBAG UMPEG Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
																	SUBBAG UMPEG Penyediaan makanan dan minuman	SUBBAG UMPEG rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SUBBAG UMPEG Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SUBBAG UMPEG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
																	SUBBAG UMPEG Penyediaan jasa non PNS			